

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 memiliki maksud dan tujuan untuk menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mewujudkan tujuan atau visi idealnya itu Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan secara tersistem. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan rumah sakit, yatim piatu dan pendidikan (PP Muhammadiyah, 2017:3).

Secara umum pasca Muktamar Malang tahun 2005 (periode 2005-2010) dan Muktamar Yogyakarta tahun 2010 (periode 2010-2015) telah terjadi perkembangan kehidupan yang dinamik, baik dalam kehidupan nasional maupun global. Dalam kehidupan bangsa terjadi dinamika kehidupan nasional yang ditandai munculnya masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang semakin kompleks serta memerlukan prioritas yang harus dipecahkan. Sedangkan dalam konteks kehidupan global pada kurun lima tahun tersebut ditandai oleh perkembangan internasional yang dinamik seperti disahkannya ASEAN Charter oleh sepuluh negara; pergeseran yang cepat titik gravitasi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya dari Eropa dan Amerika Utara ke Asia dengan pusat utamanya China, dan di tingkat ASEAN disepakatinya Masyarakat Ekonomi Asean (PP Muhammadiyah, 2017:4-5).

Berkaitan dengan tantangan abad ke-2 Muhammadiyah, Mitsuo Nakamura dan Martin van Bruinessen melihat Muhammadiyah harus mempelajari

bagaimana The Ghulen Movement melakukan internasionalisasi pemikiran Islam sehingga Muhammadiyah mampu melihat perannya secara lebih luas. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsudin menurut sebagian kalangan memberi penguatan terhadap agenda internasionalisasi Muhammadiyah pemikiran Islam. Ahmad Najib Burhani menyatakan terdapat tiga konteks proses internasionalisasi Muhammadiyah. Pertama, muncul jejaring Muhammadiyah di luar negeri melalui kebijakan pendirian Pimpinan Cabang Istimewa (PCI). Kedua, internasionalisasi Muhammadiyah dalam pengertian partisipasinya terhadap berbagai isu dan aktivitas global. Ketiga, internasionalisasi Muhammadiyah dalam konteks relasi lembaga-lembaga pendidikan dengan dunia akademik global (Abdul Mu'ti dalam Suara Muhammadiyah, 2017:1).

Pada tahun 2011 Muhammadiyah bergabung dengan International Contact Group, keterlibatan Muhammadiyah dalam ICG untuk meresolusi konflik Mindanao dilancarkan dengan cara diplomasi. Diplomasi Muhammadiyah tersebut, bekerja untuk menciptakan proses perdamaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui dialog politik yang konstruktif, atau untuk mengubah proses dialog menjadi sebuah resolusi konflik dan pembuatan perdamaian. Akhirnya pada 15 Oktober 2012 Pemerintah Filipina dan MILF menandatangani sebuah perjanjian perdamaian yang berfungsi sebagai petunjuk untuk membangun tanah air muslim di wilayah selatan, dimana kesepakatan ini dikenal dengan framework of Agreement 2012. Pemerintah Filipina dan MILF bertemu di Istana Kepresidenan Malacanang pada tanggal 15 Oktober 2012 untuk menandatangani kerangka kerja tersebut, yang menjadi tonggak sejarah

baru bagi perjuangan Bangsamoro selama kurun waktu 40 tahun di Pulau Mindanao. Perjanjian ini ditandatangani oleh pengacara Marvic Leonen perunding utama Pemerintah Filipina dengan Mohagher Iqbal utusan dari MILF.

Keberhasilan dari pencapaian kesepakatan damai yang tertuang dalam Framework of Agreement 2012 merupakan kerja keras dari semua pihak, terutama keaktifan ICG dalam memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik. Muhammadiyah dengan diplomasinya pula memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kesepakatan damai tersebut.

Langkah diplomasi yang dilakukan Muhammadiyah dalam menciptakan kepercayaan bersama terhadap pihak-pihak yang berkonflik adalah dengan cara Muhammadiyah memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dalam sebuah meja perundingan. Salah satu perundingan yang Muhammadiyah lakukan adalah dengan mengadakan forum dialog bertajuk Multi Stakeholders Dialogue on Bangsa Moro “Towards Permanent Unity and Peace for the Bangsa Moro” tanggal 5-6 April 2013 di Solo Jawa Tengah, dimana Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Multi Stakeholders dialog ini dimaksudkan untuk bersama-sama memahami permasalahan, dan memberikan masukan terhadap berbagai hambatan yang dihadapi oleh Transitional Committee Bangsa Moro dalam mempersiapkan tahapan menuju Pemerintahan mandiri atau New Political Entity Bangsa Moro yang berformat Ministerial, namun masih dalam kerangka negara Filipina, terutama dalam penyusunan Basic Law, proses rekonstruksi dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, Muhammadiyah juga bekerjasama dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) Indonesia, CDCC (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations), dan Cheng Ho Multi Cultural and Education Trust mengadakan pembicaraan informal sebagai bagian dari WPF (World Peace Forum) di Bogor, Jawa Barat pada 23-25 November 2013. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua OPAPP (Office Of Presidential Adviser On Peace Process) yaitu Teresita Dalas untuk mengawasi jalannya perundingan tersebut. Pertemuan ini menghasilkan perjanjian pengembangan Joint Road Map MNLF dan MILF yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemerintah Filipina. (Sandi, Ma'arif:2015)

Pada tahun 2017 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengembangkan pendidikan di Australia. Saat ini Muhammadiyah sedang mempersiapkan tanah untuk pendirian sekolah Muhammadiyah di Melbourne, Australia.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno mengatakan, Muhammadiyah memiliki Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muhammadiyah di Melbourne, Australia yang cukup aktif. PP Muhammadiyah dan PCI Muhammadiyah di sana berencana mengembangkan pendidikan di Australia. Saat ini pihak Muhammadiyah sedang melakukan negosiasi.

Suyatno yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 menyampaikan, di Australia sudah disiapkan tanah sekitar seluas 7 hektare yang bisa dikembangkan. Muhammadiyah sedang menjajaki, apakah tanah di Australia tersebut bisa menjadi milik Muhammadiyah. Seperti orang asing membeli tanah di Indonesia Ia menerangkan, jika sekolah Muhammadiyah sudah jadi

di Melbourne, pelajarinya bisa dari semua kalangan. Artinya, tidak hanya pelajar dari Indonesia dan tidak hanya pelajar Muslim saja yang bisa belajar di sekolah Muhammadiyah. Sehingga, nanti Muhammadiyah bisa membangun komunitas pendidikan Muhammadiyah di Melbourne, Australia.

Menurut PCI Muhammadiyah di Australia, tanah di Melbourne yang akan dibangun sekolah Muhammadiyah bisa dibeli dan lokasinya cukup bagus. Di tanah tersebut katanya sudah ada bangunan yang bisa digunakan untuk sekolah. Tapi nanti Muhammadiyah akan melakukan perluasan. Dikatakan dia, pemerintah setempat juga sudah tahu Muhammadiyah akan mendirikan sekolah di sana. Responnya juga cukup bagus. Berdasarkan informasi, PCI Muhammadiyah di Australia sudah mengumpulkan dana untuk sekolah Muhammadiyah di sana, kira-kira sudah terkumpul dana sebesar Rp 15 miliar. (Republika, CS, 2017, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/10/omlmds368-muhammadiyah-akan-bangun-sekolah-di-australia> Muhammadiyah akan bangun sekolah di Australia, di akses pada tanggal 2 Februari 2018 pada pukul 22.WIB)

Dalam konflik Palestina-Israel, Muhammadiyah sudah berkontribusi banyak untuk kemerdekaan Palestina, beberapa waktu yang lalu pimpinan Muhammadiyah Din Syamsuddin mengunjungi Palestina dan kami juga bangga pada Indonesia yang peduli akan kemanusiaan di Palestina. Dan terkhususnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang memberikan dukungan pada Palestina kami ucapkan terimakasih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi dalam Seminar Nasional: Peran

Indonesia Dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina di Ruang Sidang AR. Fachruddin A Kampus Terpadu UMY, Jum'at (30/11).

Fariz menerangkan bahwa Palestina bukanlah tanah yang dijanjikan untuk bangsa yahudi. "Palestina merupakan tanah dimana agama Tuhan yang satu bermula, baik itu yang dibawa Nabi Musa, Yaqub, Daud, Isa dan Muhammad. Dari tanah Palestina pula tercatat berbagai peristiwa penting terkait ketiga agama samawi (langit), jadi Palestina tidak bisa dikatakan tanahnya bangsa yahudi" terangnya.

Fariz juga menerangkan bahwa masalah Palestina-Israel bukan hanya masalah agama maupun keyakinan, tapi masalah kolonialisme model baru (neo-kolonialisme) yang lebih hebat dari kolonialisme terdahulu. "Masalah Palestina- Israel merupakan isu nomor satu di dunia, sehingga saya perlu tekankan bahwa masalah ini adalah bentuk kolonialisme model baru oleh Israel. Yangmana mereka (Israel) ingin menjalankan prinsip 3G (Gold, Glory dan Gospel) sebagai inti dari kolonialisme" terangnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Asia Pasifik dan Afrika & Plh. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Indonesia Dr. Ratu Silvy Gayatri mengungkapkan bahwa peran Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina bukan masalah agama, akan tetapi Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan anti terhadap kolonialisme. "Indonesia dari awalnya hingga hari ini mendukung kemerdekaan Palestina tidak lain karena Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas bumi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945" ungkapnya.

Ratu juga menambahkan bahwa ikatan antara Indonesia dan Palestina dapat dilihat dari tiga aspek. "Tidak dapat kita elakkan kedekatan Indonesia dan

Palestina dapat kita temui di beberapa aspek, yaitu kedekatan sejarah, sosial budaya dan kedekatan agama yakni Islam. Ditambah lagi dengan kepedulian Indonesia terhadap Kemanusiaan, maka itulah yang menjadi dasar untuk memberikan bantuan ke palestina. Baik itu secara materil maupun moril” tambahnya.

Sedangkan pembicara yang terakhir yaitu Guru Besar Hubungan Internasional UMY Tulus Waristo juga menekankan bahwa bantuan Indonesia kepada Palestina adalah bentuk dari kepedulian atas kemanusiaan dan penolakan atas segala penindasan. (HI UMY, CS, Muhammadiyah berkontribusi banyak untuk Kemerdekaan Palestina <http://hi.umy.ac.id/dubes-palestina-muhammadiyah-berkontribusi-banyak-untuk-kemerdekaan-palestina> di akses pada 10 Februari 2018 paa pukul 16.00 WIB)

Kasus genosida etnis Rohingnya di Myanmar belum juga berakhir. Belakangan, perbuatan biadab itu semakin menjadi-jadi di tengah suasana umat muslim di seluruh belahan dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1438 H.

Menyikapi hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap yang mendesak PBB, ASEAN, dan pemerintah Indonesia mengambil sikap atas krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingnya.

Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu tertuang dalam surat bernomor: 396/PER/I.O/H/2017 terkait Genosida Etnis Rohingnya Terkini di Myanmar. Surat tersebut ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Prof Bahtiar Effendy dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Muti.

Berikut isi surat pernyataan sikap Pengurus Pusat Muhammadiyah tersebut:

“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut etnis Rohingya sebagai etnis yang paling menderita di muka bumi. Etnis minoritas ini tertolak di Myanmar, tertindas di Bangladesh. Mayoritas etnis Rohingya tinggal di Rakhine, salah satu bagian propinsi di Myanmar. Namun mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan Myanmar karena dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Sebaliknya, Bangladesh tidak mau menerima mereka karena dianggap sebagai warga Myanmar. Ketidadaan identitas ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Bahkan, ruang gerak mereka dibatasi hanya lingkup geografis tertentu.

Sejak 1982, Etnis Rohingya telah mengalami persekusi dan pengusiran berulang kali. Terakhir, sepanjang minggu ini, tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena kebrutalan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam sepekan ini, jumlah korban dari etnis Rohingya mencapai kurang lebih 800an orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Berkaitan dengan itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh bahkan bila perlu mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

2. Mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alasan kemanusiaan, sehingga

memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar.

3. Mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Berkaitan dengan hal tersebut Muhammadiyah bersedia menjadi leading sector di dalam mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya.

4. Mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

5. Mendesak komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar, yang alih-alih menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar, justru memperburuk keadaan.

6. Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court – ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

7. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (non-megaphone diplomacy) yang selama ini yang selama ini diterapkan kepada Myanmar karena tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri praktik-praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

8. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan disediakannya sebuah kawasan/daerah di Indonesia untuk menampung sementara pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan

terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang beberapa dekade silam.

Demikian pernyataan sikap PP. Muhammadiyah sebagai respon terhadap perkembangan terkini di Myanmar yang dampaknya berpotensi mengancam situasi keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dengan kemungkinan tumbuhnya kelompok perlawanan terhadap Myanmar, perdagangan manusia, imigran ilegal yang membanjiri kawasan.” (Suara Muhammadiyah, CS, 2017, Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah terkait Genosida Rohingya Myanmar <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/09/01/pernyataan-sikap-pp-muhammadiyah-terkait-genosida-etnis-rohingya-myanmar/> di akses pada 22 Februari 2018 pada pukul 11.00 WIB)

Model internasionalisasi Muhammadiyah dapat digambarkan sebagai pengaruh dari sebaran variasi geografis anggota atau simpatisan Muhammadiyah. Meningkatnya jumlah kader Muhammadiyah yang tersebar di berbagai Negara berperan besar dalam proses pembentukan PCIM. Kendati demikian, PP Muhammadiyah juga memegang peran penting dalam proses internasionalisasi Muhammadiyah. PP Muhammadiyah terlibat aktif baik dalam tingkat individu atau secara kelembagaan memotivasi kadernya untuk mendirikan PCIM.

Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Politik dan Hubungan Internasional, Prof Bahtiar Effendy menyatakan bahwa Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan internasionalisasi Muhammadiyah. Di antara yang dilakukan adalah melalui penerbitan karya-karya Muhammadiyah dalam bahasa Inggris. Program ini akan bekerjasama dengan

salah satu penerbit Singapura yang memiliki reputasi bagus di bidang penerbitan internasional (Suara Muhammadiyah, 2017: 3)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Mengapa Muhammadiyah mengembangkan gerakan dan dakwahnya ke tingkat Internasional?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Menjadi penting dalam penelitian ini untuk mendudukan pijakan teoritis peneliti dalam penggunaan konsep yang selanjutnya bagaimana mengkaitkan konsep dan praktik tersebut dengan gerakan Muhammadiyah. Dalam riset ini, peneliti menggunakan teori gerakan sosial.

Quintan Wiktorowicz (2004) dalam bukunya yang berjudul *Islamic Activism* meggunakan terori gerakan sosial guna menjawab berbagai permasalahan umat muslim dan aktivisme gerakan Islam. Guna menjawab semua itu di butuhkan dua pendekatan yaitu: sumber daya atau teori mobilisasi sumber daya, peluang dan hambatan, Oleh karena itu, melalui teori gerakan sosial penulis akan menjabarkan pendekatan sumber daya atau teori mobilisasi sumber daya, peluang dan hambatan menurut Wiktorowicz.

1. Sumber Daya atau Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori Mobilisasi Sumberdaya (*The Resource Mobilization Theory*) merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif (Buechler). Buechler (1995).

Resource Mobilization Theory berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup

memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial.

Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall dalam Locher (2002), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Locher (2002)

Klandermans (1984), dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availability of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Klandermans(1984:583-600)

Menurut Canel dalam Triwibowo (2006), pendekatan *Resource Mobilization Theory (RMT)* memusatkan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual (keputusan mengenai pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi, serta perubahan politik) yang menciptakan gerakan sosial untuk mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Pendekatan ini menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Munculnya gerakan sosial dan capaian dari aktivisme

mereka

dipandang sebagai hasil dari proses yang terbuka dan dipengaruhi oleh serangkaian taktik, strategi dan keputusan tertentu yang dipilih oleh para aktor dalam konteks relasi kuasa dan interaksi konflikual yang ada. Triwibowo (2006)

Terdapat model aplikasi dalam pendekatan Resource Mobilization Theory menurut Pichardo, (1988) dan Triwibowo, (2006), yakni:

The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer models). Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan carriers of social movements. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Setiap Social Movement Organization (SMO) harus mampu mengelola sumber-sumber (resources) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (jobs), penghasilan (income), dan tabungan (savings), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (authority) komitmen moral (moral commitment), kepercayaan (trust), persahabatan (friendship), kemampuan (skills) dan sebagainya. Menurut Oberschall dalam Locher (2002), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam

organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (opponents).

Oberschall dalam Locher (2002), menyatakan bahwa keberadaan kelompok sosial akan lebih memungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial jika kelompok sosial tersebut tersegmentasi. Karena kelompok sosial yang tersegmentasi akan menarik keanggotaannya dari kelas khusus dalam suatu masyarakat. Semakin tersegmentasi kelompok asosiasi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar kemungkinannya untuk dimobilisasi ke dalam Social Movement Organization (SMO). Kesamaan keanggotaan dalam suatu kelompok cenderung memiliki kesamaan juga dalam hal keinginan bersama.

2. Peluang dan Hambatan

Gerakan sosial menjadi bagian dari lingkungan dan konteks sosial yang lebih luas yang ditandai dengan adanya konfigurasi keleluasaan dan hambatan yang berubah-ubah serta bersifat cair yang menjadi struktur pada dinamika gerakan. Terlepas dari tingkat ketidakpuasan, dari tingkat ketersediaan sumber daya, serta dari tingkat kelaziman pada suatu struktur mobilisasi, para aktor kolektif tetaplah dibatasi dan diberdayakan oleh faktor-faktor eksogen, dimana faktor-faktor tersebut seringkali membatasi viabilitas yang dimiliki oleh suatu gerakan serta membatasi taktik, tindakan, dan pilihan yang ada.

Walaupun pusat perhatian dari pendekatan ini terletak pada faktor faktor struktural, namun pendekatan ini tetap mempunyai asumsi yang sama dengan asumsi pada sumber daya. Terlepas dari adanya perbedaan mikro-makro di antara kedua pendekatan tersebut, namun secara khusus kedua pendekatan tersebut

mempunyai asumsi dasar yang sama dimana persetujuan pada gerakan sosial berasal dari aktor-aktor rasional. Demikian halnya, walaupun analisis strukturalis terhadap gerakan sosial lebih memusatkan perhatiannya kepada cara-cara di mana kondisi struktural bisa mempengaruhi dinamika gerakan sosial, namun terdapat pula anggapan yang menyatakan bahwa para aktor tersebut begitu mereka merasakan kesempatan dan ancaman, maka mereka akan tetap memberikan respon secara rasional untuk memaksimalkan bermacam keterbukaan maupun untuk mengatasi kesulitan (Berejikian, 1992). Fokus terhadap faktor-faktor struktural dengan demikian menjadi bagian tambahan dari keseluruhan pemahaman mengenai gerakan sosial serta menggambarkan perbedaan pada penekanan dan bukan pada pertentangan dalam ontologi yang mendasar.

Berbagai bab dalam buku di *Islamic Activism* (Hafez, Hafez dan Wiktorowicz, Lawson, dan Robinson) sepakat menyatakan bahwa kaum radikal menanggapi berbagai struktur kesempatan baik secara rasional maupun secara strategis. Setidaknya terdapat beberapa studi mengenai kelompok Islam yang moderat yang menggambarkan bahwa para aktivis gerakan tersebut juga bertindak sebagai para pemikir strategis yang dipengaruhi oleh kesempatan dan hambatan (Mufti, 1999; Alexander, 2000)

D. Hipotesa

Muhammadiyah mengembangkan gerakan dan dakwahnya ke tingkat Internasional, karena;

1. Muhammadiyah memiliki lima kekuatan, yakni; kekuatan prinsip gerakan, sumber daya manusia (SDM), sistem organisasinya, kiprah amal usaha dan dakwah Muhammadiyah sendiri;

2. Peluang dan Tantangan Muhammadiyah di tingkat global sangat besar.

E. Metodologi Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah, dalam menyusun skripsi nanti, penulis menggunakan metode kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana metode kepustakaan adalah metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan lain sejenisnya atau dengan kata lain, metode penelitiannya tidak menuntut terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam mengumpulkan data digunakan metode literature yaitu dengan cara menelaah buku-buku, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal, koran, majalah, artikel, internet (*web site*) dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran yang telah ditetapkan (Andi Prastowo, 2015:190)

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi jangkauan strategi gerakan Muhammadiyah di level Internasional, yaitu pengembangan PCIM, sister organization di Asia Tenggara dan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di luar negeri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini merupakan bab pengantar yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, dalam bab ini berisikan Pengertian Muhammadiyah, Sejarah dan perkembangannya.

BAB III dalam bab ini berisikan Sejarah Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah dan perkembangannya.

Bab IV dalam bab ini akan menjelaskan tentang hipotesa penelitian 1). Muhammadiyah memiliki sumber daya yang berkompeten dan mumpuni,serta muhammadiyah memiliki amal usaha yang besar 2). Peluang Muhammadiyah dalam mengembangkan gerakan dan dakwahnya ke tingkat Internasional sangat besar.

BAB V dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian disertai dengan kritik dan saran.